

UPAYA REUNIFIKASI TAIWAN DITINJAU DARI PERKEMBANGAN KONFLIK SELAT TAIWAN PERIODE 1981- 1991

I Gede Candra Prayogi
Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Udayana, Bali
Email: yogietigabelas@ymail.com

ABSTRACT

The civil war that occurred in China between the Communists and the Nationalists won by the Communists controlled mainland China as well. Nationalists were defeated, out of China and Taiwan as well as occupying three islands off the coast that Jinmen, Mazu, and Dazhen. Communist China tried to invade Taiwan and the third island away from the other coast to complement China. Conflict occurs when crossing the Communists attempted to occupy Taiwan, while Taiwan wants to be independent. Since going on the Taiwan Strait conflict, China and Taiwan are closed to each other each "opponent" they are. This of course results in China and Taiwan as it were a separate region. China does not want Taiwan to be its own country (independent) so that invade Taiwan to be able to invade Taiwan back. However, be aware that through the invasion of China, Taiwan is not going back to China. Plus, the encouragement of international conflict between the two countries so that this can be resolved by peaceful means. To that end, China's approach to Taiwan through "initiatives Beijing" as an attempt reunification of Taiwan. At that time, the conflict in the Taiwan Strait was a quiet period. Peace of the Taiwan Strait period circa 1962-1994. Taiwan reunification efforts can be evaluated from the activity of the Taiwan Strait, especially in economic relations.

Keywords: Taiwan Strait conflict, foreign policy, China-Taiwan reunification

1. Pendahuluan

Sejarah konflik penyebrangan Selat Taiwan dimulai ketika Front Komunis menang melawan Front Nasionalis dan memimpin

China pada tahun 1949. Front Nasionalis yang mengalami kekalahan akhirnya menduduki Taiwan yang mampu mengontrol tiga grup pulau-pulau yang jauh dari pantai yaitu

Jinmen, Mazu, dan Dazhen. Front Komunis berusaha menginvasi Taiwan dikarenakan apabila Front Komunis mampu menaklukkan Taiwan maka Revolusi China akan terlengkapi (Monte R. Bullard: hal 144). Akan tetapi, Taiwan menginginkan untuk dapat berdiri secara independen. Ketidaksamaan kepentingan antara kedua pihak ini yang menyebabkan konflik ini terjadi. Seiring waktu berjalan, konflik penyebrangan Selat Taiwan ini pun berkembang.

Dalam perkembangannya, konflik penyebrangan Selat Taiwan ini mengalami beberapa kali krisis. Krisis penyebrangan Selat Taiwan yang pertama terjadi pada tahun 1954-1955 (Monte R. Bullard, 2004: 147)¹, krisis penyebrangan Selat Taiwan kedua terjadi pada tahun 1958²(Monte R. Bullard: hal 152), krisis penyebrangan Selat Taiwan ketiga terjadi pada tahun 1962³(Monte R. Bullard, 2004: 155), dan periode tenang terjadi pada tahun 1962-1994(Monte R. Bullard, 2004: 155).

Periode tenang terjadi dikarenakan AS berpikir bahwa kemungkinan akan terjadinya konfrontasi militer secara langsung antara China dan Taiwan tetap ada(Monte R. Bullard, 2004: 156). Untuk mencegah hal tersebut, AS mulai mengambil langkah dalam meningkatkan

hubungannya dengan China. Langkah-langkahnya adalah dengan menarik armada ketujuh dari Taiwan pada tahun 1969, mereduksi pembatasan dalam perdagangan dan perjalanan, membiarkan China untuk masuk kedalam PBB, membuka dialog dengan China, dan menarik diri dari penyelesaian konflik antara China dan Taiwan asalkan konflik tersebut diselesaikan dengan jalan damai(Monte R. Bullard, 2004: 156). Langkah yang terakhir ini dituangkan dalam perjanjian antara AS dan China terkait kebijakan AS kedepan dalam menyikapi konflik antara China dan Taiwan yang disebut dengan "*Nixon Five Points*"⁴ (Monte R. Bullard, 2004: 157), yaitu:

1. Status dideterminasikan sebagai "Satu China" dan Taiwan merupakan bagian dari China.
2. AS tidak akan mendukung Taiwan untuk independen.
3. AS mencoba untuk mengendalikan Jepang dari pengaruhnya atas Taiwan.
4. AS mendukung resolusi yang penuh dengan damai.
5. AS akan mencari normalisasi hubungan dengan China.

Pembicaraan rahasia China dan AS inilah yang selanjutnya membawa China dalam upaya reunifikasi Taiwan secara damai.

Pada periode tenang inilah terutama pada kurun waktu 1981-1991 dapat kita lihat

¹ Krisis penyebrangan Selat Taiwan pertama disebabkan oleh masalah politik dimana China ingin mempengaruhi negosiasi Treaty Mutual Defense antara AS dengan Taiwan.

² Penyebab Krisis penyebrangan Selat Taiwan kedua sama dengan yang pertama untuk alasan politik agar AS menarik diri dari memihak Taiwan (keluar dari konflik China dan Taiwan).

³ Krisis penyebrangan Selat Taian ketiga disebabkan oleh adanya masalah internal yang dihadapi oleh China Daratan terkait perekonomian dan sosial sehingga Taiwan mencoba untuk menduduki China Daratan yang dibalas oleh China Daratan dengan membangun kekuatan komunis di Propinsi Fujian yang merupakan oposisi dari Taiwan.

⁴ Nixon Five Points yang merupakan *outline* kebijakan AS mendatang dalam menyikapi konflik antara China dan Taiwan adalah hasil dari pembicaraan rahasia antara Presiden Nixon, U.S. Secretary of State yaitu Henry Kissinger, dan Perdana Menteri China yaitu Chou Enlai di China pada Februari 1972.

sejauh mana upaya China dalam reunifikasi Taiwan terutama dalam perkembangan aktivitas ekonomi Selat Taiwan. Hal ini dikarenakan pada kurun waktu 1981-1991 reunifikasi Taiwan secara damai mulai diperkenalkan dan dijalankan secara sungguh-sungguh terutama

2. Upaya China dalam Reunifikasi Taiwan

Diplomasi menurut Jack C. Plano dan Roy Olton yang juga dikutip dalam Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Vol.4, No.2, yaitu diplomasi berkaitan dengan seluruh proses dalam hubungan luar negeri, termasuk perumusan kebijakan dan pelaksanaannya. Dalam arti luas, diplomasi dan politik luar negeri suatu negara adalah sama. Namun, dalam arti yang lebih sempit dan tradisional, diplomasi terkait dengan cara-cara dan mekanisme, sedangkan politik luar negeri menyangkut tujuan dan maksud. Dalam arti yang lebih terbatas ini, maka diplomasi mencakup teknik operasional dimana suatu negara mencari kepentingannya di luar yuridiksinya. (Panji Haryadi: 180)

Pada tahun 1981, kebijakan China untuk reunifikasi telah sungguh-sungguh konsisten sejak Ye Yiajin yang merupakan Ketua dari China's National People Congress (NPC) memperkenalkan Sembilan poin untuk reunifikasi secara damai (Monte R Bullard, 2004: 194). Hal ini dikenal juga sebagai "Inisiatif Beijing" (Panji Haryadi, 2008: 183). Inisiatif Beijing ini meliputi:

1. Mengakhiri pemisahan yang disayangkan dari Bangsa China secepat mungkin dengan menghimbau agar

dalam hal pembukaan aktivitas ekonomi. Untuk itu, kami mengambil rumusan masalah: Bagaimana upaya reunifikasi Taiwan ditinjau dari perkembangan konflik Selat Taiwan periode 1981-1991 terutama dalam aktivitas ekonomi Selat Taiwan ?

Partai Komunis dan Partai Nasionalis dapat bekerjasama untuk penyatuan kembali Bangsa China.

2. Reunifikasi merupakan hal yang sangat mendesak bagi Bangsa China yang terpisah terkait konflik Selat Taiwan tersebut untuk berkomunikasi satu dengan yang lainnya, bersatu kembali dengan kerabat mereka yang saling terpisah, mengembangkan perdagangan dan meningkatkan pemahaman yang berkualitas. Kami mengusulkan kedua belah pihak membuat persiapan untuk memfasilitasi pertukaran surat, perdagangan, pelayanan lintas udara dan laut, pertukaran akademik, pertukaran budaya, olahraga, dan menjangkau perjanjian selanjutnya.
3. Setelah negara disatukan kembali, Taiwan akan mendapatkan otonomi tinggi sebagai daerah administrasi khusus dan Taiwan dapat membentuk angkatan bersenjata. Selain itu, pemerintah pusat pun tidak dapat mengintervensi urusan lokal di Taiwan.
4. Sistem sosial ekonomi Taiwan tidak akan dirubah seperti cara hidup, perekonomian, dan hubungan dengan asing. Tidak ada gangguan pada hak-

hak milik dan hak hukum penuh terhadap warisan atas properti pribadi, rumah, tanah, dan perusahaan, ataupun investasi asing.

5. Orang-orang terkemuka atau tokoh-tokoh dalam otoritas dan perwakilan dari berbagai lingkungan di Taiwan dapat mengambil jabatan dari kepemimpinan dalam lembaga politik nasional dan berpartisipasi dalam menjalankan pemerintahan.
6. Ketika keuangan daerah Taiwan sedang mengalami kesulitan, pemerintah pusat dapat mensubsidi untuk memperbaiki keadaannya.
7. Untuk orang-orang dari semua keBangsaan China dan tokoh publik dari berbagai lingkungan di Taiwan yang berharap untuk datang dan menetap China daratan, dijamin bahwa tidak akan ada diskriminasi terhadap mereka, dan mereka akan mempunyai kebebasan untuk masuk maupun keluar.
8. Kaum industrialis dan pebisnis di Taiwan akan disambut dengan baik untuk berinvestasi dan menjalankan berbagai aktivitas ekonomi di China daratan dan hak legal mereka, kepentingan, dan keuntungan yang mereka dapatkan itu dijamin.
9. Unifikasi dari tanah air merupakan tanggung jawab dari seluruh Bangsa

China. Kami sungguh-sungguh menyambut orang-orang dari seluruh Bangsa China, tokoh publik dari semua lingkungan dan semua organisasi massa di Taiwan untuk membuat proposal dan saran mengenai urusan-urusan negara melalui berbagai jaringan dan dalam berbagai cara (Shirley A. Kann, 2001: 37).

Salah satu dari Sembilan poin untuk reunifikasi secara damai tersebut, yaitu poin kedua menyatakan bahwa "Reunifikasi merupakan hal yang sangat mendesak bagi Bangsa China yang terpisah terkait konflik Selat Taiwan tersebut untuk berkomunikasi satu dengan yang lainnya, bersatu kembali dengan kerabat mereka yang saling terpisah, mengembangkan perdagangan dan meningkatkan pemahaman yang berkualitas. Kami mengusulkan kedua belah pihak membuat persiapan untuk memfasilitasi pertukaran surat, perdagangan, pelayanan lintas udara dan laut, pertukaran akademik, pertukaran budaya, olahraga, dan menjangkau perjanjian selanjutnya". (Shirley A. Kann, 2001: 37)

Oleh karena itu, upaya China dalam reunifikasi Taiwan dapat dilihat dari perkembangan aktifitas ekonomi antara China dan Taiwan terutama di Selat Taiwan. Hal ini merupakan salah satu dari upaya diplomasi yang dilaksanakan China terhadap Taiwan.

3. Interdependensi ekonomi antara Taiwan dan China di Selat Taiwan

Liberalisme interdependensi merupakan ketergantungan timbal balik: rakyat dan pemerintah yang dipengaruhi oleh apa yang terjadi atau tindakan rekannya di negara lain (Robert Jackson dan Georg Sorensen, 2005: 147). Seperti yang dikemukakan oleh Rosecrance yang dinyatakan kembali dalam buku Pengantar Studi Hubungan Internasional bahwa perang terjadi pada negara-negara kurang berkembang dikarenakan tingkat pertumbuhan ekonomi yang rendah, modernisasi dan interdependensi jauh lebih lemah. David Mitrany, seorang fungsionalis yang mengajukan teori integrasi pun berpendapat bahwa interdependensi yang lebih besar dalam bentuk hubungan transnasional antarnegara dapat mewujudkan perdamaian. Lalu teori liberalisme interdependensi dinilai terlalu sederhana dalam menjelaskan hubungan kerjasama yang dapat saja mengalami kemunduran sehingga dijelaskan lebih lanjut dalam teori Interdependensi kompleks menurut Robert Keohane dan Joseph Nye yang dinyatakan kembali oleh Robert Jackson dan George Sorensen dalam buku Pengantar Studi Hubungan Internasional. Interdependensi kompleks mengasumsikan bahwa dahulu kekuatan militer merupakan pilihan dalam hal konflik antara para pemimpin negara lainnya sehingga “Politik Tingkat Tinggi” yaitu keamanan dan kelangsungan hidup memiliki prioritas di atas “Politik Tingkat Rendah” yaitu ekonomi dan masalah sosial. Akan tetapi, dalam interdependensi kompleks, hal tersebut tidak selalu demikian lagi dikarenakan dua alasan,

alasan yang pertama adalah hubungan antara negara tersebut bukan hanya hubungan antara pemimpin negara, terdapat banyak hubungan pada banyak tingkatan yang berbeda melalui banyak aktor dan cabang pemerintahan yang berbeda pula. Alasan kedua adalah tuan rumah hubungan transnasional adalah individu dan kelompok diluar negara. Bahkan kekuatan militer dinyatakan sebagai instrument kebijakan yang tidak relevan atau kurang bermanfaat dalam sebagian besar konflik. Oleh karena itu sumber daya kekuatan selain dari militer semakin penting yaitu salah satunya adalah negosiasi atau diplomasi (Robert Jackson dan Georg Sorensen, 2005: 151).

Hubungan antara China dan Taiwan yang saling menutup diri satu dengan yang lainnya mulai terbuka sekitar tahun 1987 (Monte R. Bullgard, 2004: 119). Langkah awal dari proses legitimasi perdagangan Selat Taiwan ini dimulai ketika pemerintah Taiwan menekankan kembali “Three No’s Policy” (no contact, no negotiation, and no compromise)⁵ tetapi, pemerintah Taiwan pun menambahkan pernyataan bahwa apabila menemukan jalan untuk mengirimkan benda padat kepada China maka tidak masalah. Pada waktu itulah Hongkong menjadi tempat penyaluran atau pemindahan barang. Dua belum kemudian, tepatnya pada bulan Juli, pemerintah Taiwan mengikuti masyarakat Taiwan untuk pergi ke Hongkong untuk bertemu kerabatnya dari China. Tidak hanya itu, pada bulan November, pemerintah Taiwan pergi ke China untuk

⁵ Three No’s Policy sebenarnya telah dikeluarkan terlebih dahulu oleh Presiden Taiwan Chiang Ching Kuo pada 4 April 1979. Akan tetapi, kembali ditegaskan kembali pada 18 Mei 1987 dalam hal belum melegitimasi adanya perdagangan yang melintasi Selat Taiwan.

bertemu kerabatnya. Hal-hal inilah yang merupakan perubahan besar dalam kebijakan pemerintah Taiwan terhadap China dan merupakan permulaan kontak yang berkembang kedalam hubungan perdagangan. Dua tahun kemudian, terdapat kunjungan pertama dari pemerintah Taiwan dan pada waktu yang sama rute pos serta hubungan telepon secara langsung pun dimulai. Pada tahun 1990 pun pegawai di pemerintahan Taiwan pun diijinkan untuk mengunjungi kerabatnya di China. Semuanya inilah yang merubah kebijakan Taiwan yang membuat fondasi untuk perdagangan dan investasi dimulai (Monte R. Bullgard, 2004: 119).

Data statistik menunjukkan bahwa setiap tahunnya terjadi peningkatan jumlah orang yang berkunjung baik dari Taiwan ke China maupun dari China ke Taiwan. Hal ini tentu sangat berperan untuk memperkenalkan kondisi kehidupan masing-masing negara tersebut sehingga dapat melihat peluang bisnis dari kedua negara tersebut. Sebelum terjadi kunjungan antara masyarakat Taiwan dan China, masyarakat Taiwan percaya bahwa masyarakat China hidup dibawah penindasan yang tak tertahankan, menggunakan pakaian yang buruk atau compang-camping, dan menderita kelaparan sampai mati. Sebaliknya, masyarakat China percaya bahwa masyarakat Taiwan dieksploitasi oleh masyarakat Amerika dan harus memakan kulit pisang untuk bertahan hidup. Kunjungan ini yang telah memulai merubah pandangan dan sikap terkait kondisi hidup masing-masing (Monte R. Bullgard: hal 120). Berikut adalah table kunjungan antara Taiwan dan China :

Tabel Kunjungan antara Taiwan dan China (Monte R. Bullgard, 2004: hal 120).

Year	Pengunjung China ke Taiwan	Pengunjung Taiwan ke China
1989	4.838	541.000
1990	7.520	948.000
1991	11.074	946.632
Total	23.432	2.435.632

Dari tabel kunjungan antara China dan Taiwan, jelas terlihat bahwa adanya peningkatan pengunjung yang signifikan. Banyak pengunjung datang mengunjungi keluarganya yang telah terpisah dari mereka lebih dari empat puluh tahun lamanya dan kebanyakan dari mereka adalah turis biasa (Monte R. Bullgard, 2004: 121).

Selain kunjungan, terdapat pula empat bidang lain yang merubah persepsi dan perilaku tentang Selat Taiwan dan membuat iklim yang lebih kondusif untuk aktivitas ekonomi (Monte R. Bullgard, 2004: 121) :

1. Jaringan Pos (surat) : Direktorat jenderal pos Taiwan mulai memproses surat/pos tetap dari China pada Maret 1988 dan untuk China pada April 1988.
2. Jaringan Telepon : komunikasi telepon antara China dan Taiwan, kebanyakan rutenya melalui Hongkong mulai pada Juni 1989.
3. Pengiriman Uang : pengiriman uang antara China dan Taiwan termasuk pengiriman uang untuk kerabat, donasi, dan transfer pembayaran lainnya.
4. Pertukaran Budaya : pertukaran budaya meliputi segala sesuatu yang

berhubungan dengan olahraga, drama, dan pementasan seni.

Data ini mengatur skrup yang dimulai secara umum dilegalkan pada 1987, mengalami peningkatan dan sekarang berpengaruh besar dalam kalkulasi penyebrangan Selat (Monte R. Bullgard, 2004: 121).

Namun, banyaknya masyarakat Taiwan yang melakukan perjalanan ke China maupun sebaliknya untuk keperluan bisnis tidak diketahui secara jelas. Yang diketahui adalah jumlah kunjungan keseluruhan yang meliputi kunjungan untuk keperluan bisnis, mengunjungi kerabat, dan kunjungan yang berulang (Monte R. Bullgard, 2004: 122). Untuk gambaran yang lebih jelas, dapat dilihat dalam aktivitas bisnis melalui perdagangan dan investasi. Pada Juli 1988, China mengeluarkan regulasi untuk mendorong investasi dari masyarakat Taiwan (Monte R. Bullgard, 2004: 122). Sedangkan upaya pertama pemerintah Taiwan untuk mengatur investasi di China terjadi pada Oktober 1990 (Monte R. Bullgard, 2004: 123). Pada tahun ini pula bahwa investasi di China telah mencapai 3.353 produk (Monte R. Bullgard, 2004: 123). Barang-barang yang populer diproduksi adalah sepatu dan pakaian bahkan produk teknologi informasi seperti komputer (Monte R. Bullgard, 2004: 124). Keuntungan bagi pebisnis Taiwan adalah terkait tenaga kerja di China tergolong murah dan peraturan terkait investasi yang lemah sehingga kebanyakan melakukan investasi modal untuk alat-alat pabrik di China. Akan tetapi, Taiwan pun mengalami dilema dikarenakan investasi yang lebih baik di China dan dorongan domestik akan kebutuhan untuk investasi di China akan

menyebabkan pasar Taiwan kalah. Ditambah lagi, adanya hal-hal yang semakin mendorong Taiwan untuk lebih berinvestasi seperti ekonomi Taiwan yang cukup lemah dan tekanan dari WTO dalam mereduksi hambatan perdagangan (Monte R. Bullgard, 2004: 124). Hal-hal ini tentunya semakin meningkatkan interdependensi ekonomi antara Taiwan dan China. Seperti halnya investasi, perdagangan *cross trade* pun berkembang. Perkembangan perdagangan *cross trade* merupakan keuntungan Taiwan. Hal ini dikarenakan dapat membuat keseimbangan perdagangan untuk Taiwan dimana dalam investasi, investasi menuju China lebih besar daripada di Taiwan sedangkan dalam perdagangan, ekspor menuju China lebih besar daripada impor dari China (Monte R. Bullgard, 2004: 126-128). Berikut adalah data statistik dari ekspor-impor dari China dan Taiwan:

Tabel Perdagangan *Cross Strait* Tahun 1990-1991 (Monte R. Bullgard, 2004: 127)

Tahun	China Impor dari Taiwan (Milliar Dollar US)	China Ekspor ke Taiwan (Milliar Dollar US)	Total Perdagangan (Milliar Dollar US)
1990	2,2543	0,3197	2,574
1991	3,369	0,5948	4,233

Terlihat bahwa adanya peningkatan drastis dari perdagangan secara langsung antara kedua negara tersebut melalui Selat Taiwan. Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa aktivitas

ekonomi tersebut yang menyebabkan interdependensi ekonomi antara China dan Taiwan. Interdependensi ekonomi merupakan salah satu cara yang diyakini dapat mengurangi terjadinya konflik dan dapat mempererat hubungan antarnegara.

4. Kesimpulan

Upaya reunifikasi Taiwan ditinjau dari perkembangan konflik Selat Taiwan pada kurun waktu 1981-1991 terutama dalam aktivitas ekonomi telah terlihat adanya peningkatan yang baik. Sebelum adanya upaya-upaya reunifikasi, China dan Taiwan menutup diri dan tidak melegalkan segala bentuk komunikasi, perdagangan, investasi, dan aktivitas ekonomi lainnya. Akan tetapi, sejak dilegalkannya

perjalanan ataupun kunjungan dari masyarakat China dan Taiwan, dilegalkannya perdagangan, dan dibukanya rute telekomunikasi yang meliputi telepon dan pos maka hubungan China dan Taiwan semakin membaik terutama dalam aktivitas ekonomi. Selain itu, baik masyarakat China di China Daratan maupun masyarakat China di Taiwan pun saling mengenal dan saling membuka pemikiran positif terkait kondisi kehidupan di China maupun di Taiwan. Hal ini tentu menjadi permulaan yang bagus dalam upaya reunifikasi Taiwan, bahkan diharapkan dapat membawa China Daratan dan Taiwan menjadi satu Negara-Bangsa China kembali seperti dahulu sebelum konflik Selat Taiwan terjadi.

Daftar Pustaka

- Bullard, Monte R. (2004). *“Strait Talk: Avoiding A Nuclear War Between The U.S. and China Over Taiwan.”* Monterey Institute of International Studies.
- Haryadi, Panji. (2008). Diplomasi China Dalam Menerapkan Program Reunifikasi Taiwan. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional* Vol. 4 No. 2.
- Jackson Robert dan Georg Sorensen. (2005). *Pengantar Studi Hubungan Internasional (Terjemahan)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kan, Shirley A. (2001). *“China/Taiwan: Evolution of the “One China” Policy-Key Statement from Washington, Beijing,*

and Taipei”. Congressional Research Service.